

Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Rumusan Filsafat Sejarah Nasional Muhammad Yamin

The Relevance of Ibn Khaldun's Thought in the Formulation of Muhammad Yamin's Philosophy of National History

Moch. Dimas Galuh Mahardika¹

Guru Sejarah SMAS Al-Izzah

Dimas.dg20@gmail.com

Article History

Submitted: July 20, 2024

Revised: Mei 27, 2025

Accepted: June 11, 2025

How to Cite:

Moch. Dimas Galuh Mahardika. “Pengaruh Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Rumusan Filsafat Sejarah Nasional Muhammad Yamin” *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.14421/ref.v25i1.5976>.

Abstract

This research explores the relevance of Ibn Khaldun's philosophy of history on the national historical philosophy formulated by Muhammad Yamin, particularly in the context of Indonesia's historiography. It begins by reflecting on the National History Seminar I of 1957, where the notion of an Indonesia-centric historiography was debated. The paper emphasizing Yamin's often-overlooked contributions to the discourse on national historical philosophy. By examining Yamin's alignment with Khaldun's ideas, particularly regarding the dynamics of history as influenced by divine will and sociological factors, the study underscores how Yamin's historical philosophy is rooted in the quest for truth, the specificities of Indonesian history, and the synthesis of various historical narratives. The paper categorizes Yamin's philosophy into four pillars: the pursuit of truth, the distinctiveness of Indonesian history, the synthesis of historical interpretations, and the articulation of Indonesian nationalism. It concludes by asserting that while historical narratives are inherently subjective, they must strive for objectivity through critical engagement with sources, thus contributing to a coherent and ideologically sound national historiography.

Keywords: Ibnu Khaldun; Muhammad Yamin; Filsafat Sejarah Nasional.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi relevansi filsafat sejarah Ibnu Khaldun dengan filsafat sejarah nasional yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin, khususnya dalam konteks historiografi Indonesia. Penelitian ini dimulai dengan merefleksikan Seminar Sejarah Nasional I pada tahun 1957, di mana gagasan tentang historiografi Indonesia-sentris diperdebatkan. Makalah ini menekankan kontribusi Yamin yang sering diabaikan dalam wacana filsafat sejarah nasional. Dengan mengkaji keselarasan Yamin dengan gagasan Khaldun, khususnya mengenai dinamika sejarah yang dipengaruhi oleh kehendak ilahi dan faktor sosiologis, penelitian ini menggarisbawahi bagaimana filosofi sejarah Yamin berakar pada pencarian kebenaran, kekhususan sejarah Indonesia, dan sintesis berbagai narasi sejarah. Artikel ini mengkategorikan rumusan filsafat sejarah nasional Yamin ke dalam empat pilar: kebenaran, sejarah Indonesia, sintesis, nasionalisme Indonesia. Tulisan ini menyimpulkan dengan menegaskan bahwa meskipun narasi sejarah pada dasarnya bersifat subjektif, narasi sejarah harus mengupayakan objektivitas melalui keterlibatan kritis dengan sumber-sumber sejarah, sehingga dapat berkontribusi pada historiografi nasional yang koheren dan sehat secara ideologis.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun; Muhammad Yamin; Filsafat Sejarah Nasional.

A. Pendahuluan

Seminar Sedjarah Nasional I yang diselenggarakan pada tahun 1957 dengan tema pembahasan tentang perumusan penulisan sejarah Indonesia yang lebih akademik dengan pendekatan historiografi Indonesiasentris masih menjadi diskusi yang hangat dan tetap relevan dari waktu ke waktu. Apabila kita membaca buku yang ditulis oleh Purwanto¹ tentang “Gagalnya Historiografi Indonesiasentris”, kita akan menemukan berbagai persoalan mendasar tentang apa dan bagaimana historiografi Indonesiasentris itu. Dalam seminar itu pula, banyak tokoh yang ikut menyumbangkan pikirannya untuk merumuskan “bagaimana menulis historiografi Indonesiasentris”? Sebagai sebuah negara muda yang membutuhkan satu pijakan metodis-ideologis yang terlepas sama sekali dari perspektif kolonial, maka beberapa tokoh terlihat bergairah dalam mengutarakan pikiran-pikirannya untuk merumuskan tujuan itu. Sorotan utama tertuju pada benturan gagasan antara Soedjamtoko dengan Yamin seputar persoalan filsafat sejarah yang berkaitan dengan tema besar historiografi ini. Dalam artikel ini, penulis tidak akan membahas bagaimana pertentangan yang terjadi antara dua tokoh tersebut, karena bagi penulis gagasan mereka berdua memiliki sumbangsih perspektif yang besar di dalam seminar itu. Namun penulis tertarik untuk membahas kembali apa yang disampaikan oleh Yamin² di dalam seminar tersebut, karena penulis melakukan kroscek agaknya gagasan Yamin tentang filsafat sejarah nasional ini hampir terlupakan.

Tercermin dari tulisannya, pemikiran Yamin tampak selaras dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang gerak sejarah bahwa kehendak Tuhan yang termanifestasi dalam tindakan sosiologis manusia merupakan pangkal penggerak sejarah. Secara tegas, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan kehendak Tuhan yang diwujudkan dalam perilaku manusia yang selalu “berubah” dan bersifat dinamis. Dinamika yang terjadi dalam masyarakat kemudian menghasilkan berbagai peristiwa yang dikehendaki untuk menuju sebuah kemajuan.

Yamin membedah pemikiran Ibnu Khaldun tentang filsafat dan mengklasifikasikan beberapa komponen ilmu filsafat itu sendiri. Beberapa komponen tersebut di antaranya: logika, matematika, fisika dan metafisika. Dalam tradisi Islam, logika dan matematika merupakan suatu ilmu yang menjadi dasar dan pengantar ilmu pengetahuan. Sedangkan fisika dan metafisika bertugas untuk melakukan penyelidikan atas ilmu pengetahuan itu sendiri. Konsepsi ilmu sejarah Ibnu Khaldun mengartikan bahwa setiap aktifitas manusia dalam babakan waktu dan tingkatan turunan manusia bermuara kepada sebuah pemahaman tentang kolektifitas manusia dalam kehidupannya. Mungkin konsep ini kongruen dengan apa yang disebut oleh Hobsbawm³ bahwa sejarah merupakan hasil dari *Gemeinschaft-Gessellschaft*: korporasi komunitas. Perjalanan di dalam dimensi ruang dan waktu

¹ Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris* (Yogyakarta: Ombak, 2008).

² Muhammad Yamin, “Tjatur-Sila Chalduniah” (*Seminar Sedjarah Nasional I*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1957), 26–34.

³ E. J Hobsbawm, “From Social History to the History of Society,” *Daedalus* 100, no. 1, (1971): 20–45.

diisi oleh kesatuan manusia yang diistilahkan sebagai *milla* dan *ummat*. Sedangkan *negara* merupakan perwujudan masyarakat yang memiliki keterikatan emosional kolektif berupa kesetiakawanan yang besar, *a great solidarity* atau '*assabiya kubra*).

Ibnu Khaldun juga berpendapat dalam pemahaman sejarah yang bersifat hermeneutik, sesuai dengan teks Arab namun berbeda dari harapan peneliti Eropa, sejarah seharusnya tidak mengungkapkan sebab-sebab atau menarik kesimpulan dari peristiwa-peristiwa individual. Pemahaman sejarah dalam istilah substansialis tidak tercermin dalam teks Ibn Khaldūn, yang lebih menekankan pada proses interpretasi sejarah. Dalam pandangannya, "esensi" sejarah tidak ada; kita hanya memiliki *bātin* (sebab-sebab yang dijelaskan oleh ilmu perkembangan), yang tidak terlihat dalam kronik. Meskipun kronik mungkin dihapus dari catatan yang salah, ia tetaplah kronik. Sebab-sebab adalah faktor perkembangan, bukan penyebab peristiwa itu sendiri. Ini menunjukkan perbedaan mendasar antara pendekatan substansi dan proses dalam interpretasi sejarah. *ẓāhir* (catatan nyata) dan *bātin* (hukum yang tersembunyi) adalah dua hal yang berbeda, di mana *bātin* tidak berfungsi untuk mendukung atau memunculkan *ẓāhir* (peristiwa). Dengan kata lain, *bātin* bukanlah esensi yang terwujud dalam *ẓāhir*; sebaliknya, *ẓāhir* berhubungan dengan *bātin* melalui proses "pemeriksaan" oleh peneliti, yang menolak laporan yang tidak valid dan menerima yang valid. Laporan-laporan (*ẓāhir*) harus ada untuk dianalisis dengan hukum-hukum perkembangan (*bātin*); laporan-laporan tersebut tidak dihasilkan oleh *bātin* atau dianggap sebagai manifestasinya. Laporan-laporan tentang peristiwa, bukan peristiwa itu sendiri, adalah *dāhir* sejarah yang perlu diperiksa terhadap *bātin*-nya⁴.

Ibnu Khaldun mengartikulasikan ilmu filsafah yang dipantik oleh matematika dan logika kemudian beralih kepada jenjang berikutnya yaitu ilmu pengetahuan yang bertingkat setelah logika. Maka asas yang mendasari itu semua adalah agama dan segenap peraturannya (*aslan*), dan selanjutnya adalah ilmu pengetahuan filsafati atau '*ulum al-hikma*'. Secara umum, Yamin memaknai pemikiran tersebut sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan bahwa ilmu hitung dan logika merupakan perangkat dasar dan kesaksian fisika dan metafisika akan membentuk *filsafah* dalam taraf yang paling *dasar* sebagai *hikmah* atau dapat disebut sebagai: pra-logika. Pikiran Ibnu Khaldun tentang bagaimana gerak sejarah yang kemudian menginspirasi Yamin kelak akan menguatkannya tentang gagasan filsafat sejarah nasional. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelaah kembali filsafat sejarah nasional dalam artikel ini dengan judul "*Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Rumusan Filsafat Sejarah Nasional Muhammad Yamin*".

B. Sekilas Tentang Perjuangan Muh. Yamin

Muhammad Yamin adalah seorang negarawan yang hidup dari masa ke masa, menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah yang sangat aktif dalam aktivitas perjuangan kemerdekaan sampai pada peranannya dalam merumuskan dasar-dasar negara⁵.

⁴ Andrey V. Smirnov, "Translation as the Manufacturing of Meaning: A Few Words about the Title of Ibn Khaldūn's History," *Russian Studies in Philosophy* 58, no. 6 (November 1, 2020): 491–521, <https://doi.org/10.1080/10611967.2020.1868262>.

⁵ St Sularto and D. Rini Yunarti, *Konflik Di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI Dan Kemerdekaan* (Jakarta: Kompas, 2010).

Pikiran-pikiran Yamin dapat kita pahami dari berbagai tindakan dan aktivitas politiknya selama periode Pergerakan Nasional⁶. Banyak gelar yang bisa kita sematkan untuk Yamin, beliau adalah seorang sastrawan, politisi atau bahkan sejarawan? Karena kedekatan intelektualnya dengan sejarah Nusantara—setidaknya beliau sangat mengagumi Majapahit sebagai sebuah kerajaan besar di abad 13-14. Menurut Yamin, Majapahit adalah spirit kemandirian, keberanian dan konsistensi dalam menjaga identitas ke-Nusantara-an. Sumpah Palapa yang terkenal dari Majapahit itulah yang kemudian banyak menginspirasi Yamin dalam rumusan-rumusannya tentang bagaimana dasar negara Indonesia merdeka.

Aktivitas politik Yamin setidaknya dimulai ketika usianya menginjak 16 tahun, ia sudah menjadi tokoh penting dalam organisasi *Jong Sumatranen Bond*. Kegiatan Muhammad Yamin di dunia politik semakin terlihat jelas setelah ia bergabung dengan P.P.P.I. dan terlibat dalam Kongres Pemuda serta Perkumpulan Indonesia Muda. Namun, perjuangannya dalam politik praktis dan kepartaian dimulai dengan Partindo (Partai Indonesia). Dari sejarah pergerakan Indonesia di tahun 1930-an, Pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan tegas yang menyebabkan banyak pemimpin pergerakan dipenjara, sehingga posisi P.N.I. sebagai partai besar pada waktu itu menjadi sangat sulit. Akibatnya, P.N.I. mengalami kesulitan untuk bertahan, hingga akhirnya dibubarkan dan muncul dua partai baru: Partindo yang dipimpin oleh Mr. Sartono dan P.N.I.-Pendidikan yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir⁷.

Dalam Kongres II Partindo yang diadakan pada 23 April 1933 di Surabaya, Muhammad Yamin, S.H. dengan semangat membara, melontarkan semboyan "Indonesia Merdeka Sekarang". Pidato ini memicu kemarahan Pemerintah Belanda. Kongres II Partindo juga memutuskan bahwa seluruh gerakan kebangsaan akan berfokus pada pembentukan Republik Indonesia.

Gairahnya dalam membentuk identitas nasional adalah manifestasi perjuangannya untuk Indonesia merdeka. Menurut Yamin proklamasi tidak hanya sekedar memerdekakan sebuah bangsa, proklamasi adalah suatu tindakan untuk memberikan peringatan kepada kolonialis bahwa bangsa Indonesia bukanlah sekompok manusia yang hidup tanpa tujuan, bangsa Indonesia adalah sekumpulan manusia yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup mulia⁸. Sebagai seorang loyalis proklamasi, Yamin meyakini bahwa setiap tindakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik dengan mengangkat senjata ataupun perjuangan dalam jalur diplomasi adalah suatu tindakan yang amat mulia⁹.

Kembali kepada periode sebelum peristiwa Proklamasi, Muh. Yamin dalam sidang pertama BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan) Indonesia

⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

⁷ Sutrisno Kutoyo, *Prof. H. Muhammad Yamin S.H.* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982).

⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1951).

⁹ J Asshidiqie and A Marwan, "Proklamasi Menurut Mohammad Yamin: Berdaulat Dan Berkonstitusi," *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2019): 1–20.

29 Mei – 1 Juni 1945¹⁰, Yamin menyumbangkan gagasannya tentang dasar-dasar negara: (1) Peri Kebangsaan; (2) Peri Kemanusiaan; (3) Peri Ketuhanan; (4) Peri Kerakyatan; (5) Kesejahteraan Rakyat. Yamin berkeyakinan bahwa dasar negara ini merupakan hasil dari penggalian nilai-nilai luhur Nusantara sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi, yang dalam perjalanan sejarahnya menghadapi situasi penindasan, terus bergerak untuk mencapai cita-cita kemerdekaan dan mengembalikan kejayaan bangsa seperti yang pernah dilakukan oleh Majapahit.

Menurut Yamin, masa lalu adalah inspirasi yang harus tetap dihidupkan untuk membangun harapan-harapan. Perjalanan Sejarah Indonesia merupakan lembaran-lembaran sarat makna tentang nilai-nilai kehidupan, spirit kemandirian, spirit keberanian yang musti diintrodusir untuk generasi yang akan datang. Konsep berpikir Yamin tentang sejarah dan filsafat sejarah setidaknya secara dominan dipengaruhi oleh cara berpikir Ibnu Khaldun dalam mendefinisikan dan menguraikan ilmu sejarah beserta unit-unit yang ada di dalamnya, dan penjelasan terkait hal itu akan diuraikan dalam subab berikutnya.

C. Filsafat Sejarah Dalam Pikiran Ibnu Khaldun

Al-Ibnu Khaldun merupakan seorang intelektual muslim yang masyhur di abad 14 menyumbangkan pikirannya pada berbagai bidang ilmu pengetahuan khususnya sejarah dan filsafat sejarah. Bagi Ibnu Khaldun sejarah adalah *ibrar* (pendidikan moral) untuk umat manusia yang saling bahu-membahu membangun peradaban¹². Setiap dinamika perjalanan umat manusia yang melakukan akan menghasilkan jejak berupa fisik (*artifact*) maupun berupa abstraksi pemikiran yang di dalamnya mencakup ide, nilai-nilai atau budaya (*mentifact*). Peninggalan-peninggalan ini kemudian menyatu dalam suatu realitas terstruktur yang dapat diteliti secara terukur. Ibnu Khaldun melihat segala sesuatu yang terjadi di atas dunia merupakan hasil dari kausalitas yang tidak terputus¹³. Sebuah kejadian adalah sebab dari kejadian yang akan datang, sebuah peristiwa adalah sebab sekaligus hasil dari peristiwa yang mendasarinya.

Karya terkenal dari Ibnu Khaldun tentang filsafat sejarah terdapat dalam buku *Al-Muqaddimah*. Dalam bagian pengantar *Al-Muqaddimah*, Ibn Khaldūn menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan kesalahan dalam beberapa karya sejarah dan menguraikan metode untuk menghindarinya. Secara singkat, faktor-faktor tersebut meliputi: kecenderungan penulis untuk melebih-lebihkan informasi demi kepentingan pribadi; bias dan keberpihakan; pengabaian terhadap perubahan

¹⁰ Syamsun Niam, Imam Fuadi, and Mohammad Ridho, "PANCASILA VIS A VIS ISLAM The Views of the Four Indonesian Muslim Leaders and Their Implication in Stemming the De-Ideologization of Pancasila in Indonesia)," *Islamic Inquiries* 2, no. 1 (June 2023): 25–40, <https://doi.org/10.22034/is.2023.330782.1073>.

¹¹ A.B Kusuma and R.E Elson, "A Note on the Sources for the 1945 Constitutional Debates in Indonesia," *Bijdragen Tot de Taal-, Land En Volkenkunde* 167, no. 2–3 (2011): 196–209.

¹² Budi Sujati, "Konsepsi Pemikiran Filsafat Sejarah Dan Sejarah Menurut Ibnu Khaldun," *Tamaddun* 6, no. 2 (2018): 127–47.

¹³ Djamel Chabane, "The Structure of 'Umrān al-'Alam of Ibn Khaldun," *The Journal of North African Studies* 13, no. 3 (2008): 331–49.

yang diakibatkan oleh waktu; ketidaktahuan akan konteks sejarah dan isu-isu kontemporer; tujuan penulisan sejarah dan niat penulis yang dijadikan rujukan; ketergantungan pada pengetahuan orang lain; serta keterbatasan dalam penguasaan bahasa Arab.

Untuk mengatasi masalah ini, Ibn Khaldūn menekankan bahwa sejarawan harus mempertimbangkan konteks sejarah dan isu-isu terkini dalam karya mereka, memahami tujuan penulisan sejarah, dan menyadari niat penulis sumber yang mereka gunakan serta niat mereka sendiri. Mereka juga harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan serta keterampilan seperti geografi, tata kota, dan fisiologi; memeriksa informasi berdasarkan norma politik; dan berusaha bersikap objektif dan jujur dalam pengolahan materi. Selain itu, mereka perlu mengandalkan kecerdasan dan menunjukkan pemikiran kritis, serta memverifikasi informasi dengan fakta-fakta yang ada. Penelitian yang teliti, kesadaran akan perubahan sepanjang waktu, dan penerapan penalaran analogis hanya ketika mereka memiliki pengetahuan akurat tentang masa kini dan pengetahuan mendalam tentang masa lalu juga sangat penting. Mereka harus bebas dari pengaruh politik dan tidak menjadikan karya mereka sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Kesadaran akan kecenderungan doktrinal dan politik diri sendiri juga krusial, agar keyakinan sektarian tidak mempengaruhi hasil karya mereka¹⁴.

Definisi sejarah yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun setidaknya memuat dua aspek di antaranya adalah aspek internal dan eksternal. Sisi luar sejarah seolah-olah tampak sebagai sebuah siklus periodik atas kejadian-kejadian masa lampau. Akan tetapi apabila dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif, sejarah merupakan suatu proses bernalar secara kritis sebagai upaya menemukan kebenaran. Kemudian hubungan ilmu sejarah dengan filsafat dalam pikiran Ibnu Khaldun adalah kekuatan inspiratif dan intuitif, tetapi filsafat juga memberikan kekuatan kritis-logis bagi sejarah.

Setidaknya ada tujuh kritik yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun atas konsepsinya tentang historiografi. *Pertama* sikap keberpihakan kepada pendapat atau mazhab-mazhab tertentu dalam ilmu sejarah. *Kedua* percaya secara berlebihan terhadap seseorang yang menukilkan sejarah. *Ketiga* kegagalan dalam memahami sejarah secara objektif dengan mengedepankan perkiraan dan prasangka. *Keempat* percaya kepada sesuatu yang sulit untuk diverifikasi kebenarannya—tanpa sumber data yang jelas. *Kelima* kelemahan penafsir dalam mencocokkan tafsiran sumber sejarah dengan kejadian sebenarnya. *Keenam* kecenderungan seseorang untuk dekat dengan tokoh berpengaruh yang memiliki kemungkinan untuk memperbesar subjektivitas dalam sejarah. *Ketujuh* minimnya pengetahuan tentang metode-metode kebudayaan¹⁵.

¹⁴ Lilian Abou-Tabickh, "How Significant Is the Term 'Condition' (Ḥāl) to Understanding Ibn Khaldūn's Historical and Political Thought? Al-ʿaṣabiyya as an 'Essential Condition' of Human Association," *The Journal of North African Studies* 27, no. 4 (2022): 761–85, <https://doi.org/10.1080/13629387.2020.1861444>.

¹⁵ Hasbullah Moeflih and Dedi Supriyadi, *Filsafat Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Uraian kelemahan-kelemahan dalam historiografi tersebut kemudian dilengkapi oleh Ibnu Khaldun dengan konsep *ilm al-'umran* yaitu sejarah memerlukan ilmu bantu dalam menjelaskan berbagai rangkaian peristiwa dan kejadian di masa lampau. Ibnu Khaldun mengusulkan hubungan yang simbiotik antara sosiologi dan sejarah, dengan demikian meletakkan dasar bagi pemikiran sosiologi historis. Ia mencatat bahwa sosiologi menyediakan para sejarawan dengan alat dan kriteria untuk menganalisis peristiwa yang tercatat, dan dalam hal yang sama, sejarah menyediakan sosiolog dengan bahan-bahan sejarah untuk memahami realitas sosial saat ini. Dalam pandangannya, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa dunia sosial diatur oleh prinsip dan hukum di antaranya¹⁶:

- masyarakat dapat berubah; bersifat dinamis, tidak statis;
- peristiwa sosial tidak terstruktur secara acak, melainkan mengikuti pola yang teratur dan struktur yang berurutan;
- hukum sosial berlaku pada masyarakat dan tidak dapat diubah begitu saja. Dalam pengertian ini, seperti Durkheim, Ibn Khaldun percaya bahwa 'kolektif' lebih unggul daripada 'individu';
- hukum-hukum ini dapat ditemukan dengan menerapkan penalaran manusia untuk mengumpulkan data melalui catatan sejarah dan/atau pengamatan langsung terhadap peristiwa yang sedang berlangsung;
- hukum-hukum ini bukan merupakan refleksi dari dorongan biologis, melainkan dibangun secara sosiologis.

Ibn Khaldun merangkum makna yang berkaitan dengan radikalisme ilmu sosial dalam konsep *'umran* sebagai perkembangan dalam masyarakat, yang mencerminkan peningkatan keramahan. Ia menyatakan dengan terkenal bahwa "manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial". Pernyataan ini, terkait dengan penemuan terbaru dalam ilmu sosial tentang pengaruh budaya terhadap alam, mengisyaratkan bahwa alam harus tunduk pada budaya yang dihasilkan dari akal budi manusia. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial (budaya), dan aspek sosiallah yang menentukan fungsi alam. Sosial menunjukkan di mana tujuan akhir berada, jika memang ada tujuan tersebut. Oleh karena itu, kita dapat melihat *'umran* sebagai representasi tajam dari aspek sosial, solidaritas antar manusia yang lebih mudah terwujud di kota sekarang dan di desa di masa depan. Konsep *'umran* Khaldunian ini diperkuat oleh fakta bahwa identitas memberikan manusia motivasi untuk bertindak sebagai *badaoui* (petani desa) atau *hadhari* (penghuni kota). Istilah *'umran badaoui* dan *'umran hadhari* digunakan untuk menunjukkan bahwa *'umran* tidak identik dengan urbanisme, meskipun beberapa terjemahan mungkin memberikan makna itu, yang menurut saya, terlalu sempit dan bahkan cenderung bias¹⁷.

¹⁶ Ali Arazeem Abdullahi and Bashir Salawu, "Ibn Khaldun: A Forgotten Sociologist?," *South African Review of Sociology* 43, no. 3 (2012): 25–40.

¹⁷ Laroussi Amri, "The Concept of *'umran*: The Heuristic Knot in Ibn Khaldun," *The Journal of North African Studies* 13, no. 3 (September 2008): 351–61, <https://doi.org/10.1080/13629380701844672>.

Kompleksitas pemikiran Ibnu Khaldun ini yang kemudian menginspirasi Muhammad Yamin tentang bagaimana merumuskan sebuah dasar-dasar pemikiran sebagai alat untuk menulis sejarah Indonesia yang dapat mencakup berbagai kejadian dalam sejarah Indonesia tanpa meninggalkan unsur-unsur ideologis sebagai pemersatu bangsa yang memiliki kesamaan nasib dalam sejarah. Yamin mencetuskan sebuah konsep dengan mengadopsi dari pemikiran Ibnu Khaldun tentang filsafat sejarah yang disebut sebagai *Catur Sila Chalduniah*¹⁸. Beberapa unsur dalam *Catur Sila Chalduniah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Assabiyah (Solidaritas Kelompok)

Asabiyah, konsep sentral dalam pemikiran Ibnu Khaldun, merujuk pada solidaritas kelompok atau kohesi sosial yang menjadi kunci naik turunnya peradaban. Ini lebih dari sekadar ikatan darah; 'asabiyah adalah hubungan psikologis dan sosial kuat yang menyatukan anggota kelompok dalam satu tujuan, mendorong mereka untuk saling mendukung dan berkorban. Kekuatan 'asabiyah sangat terlihat pada masyarakat Badui yang nomaden. Ketergantungan mereka satu sama lain untuk bertahan hidup menumbuhkan solidaritas yang tak tergoyahkan, memungkinkan mereka untuk bersatu, menaklukkan, dan mendirikan dinasti atau negara. Namun, seiring dengan berdirinya dinasti dan masyarakat yang beralih ke kehidupan urban yang makmur, 'asabiyah mulai memudar. Kemewahan, sentralisasi kekuasaan yang menghilangkan elemen solidaritas, serta munculnya perpecahan dan korupsi menjadi penyebabnya. Melemahnya 'asabiyah ini pada akhirnya menyebabkan kemunduran dan kehancuran suatu dinasti, membuka jalan bagi kelompok baru dengan 'asabiyah yang lebih kuat untuk mengambil alih. Penting untuk dipahami bahwa 'asabiyah, menurut Ibnu Khaldun, adalah kekuatan sosial yang netral. Ia dapat bersifat konstruktif untuk pembangunan dan keadilan, tetapi juga bisa merusak jika didasari oleh kesombongan atau ketidakadilan¹⁹²⁰.

2. Determinisme Lingkungan

Ibnu Khaldun adalah salah satu pemikir awal yang menyadari betapa besarnya pengaruh lingkungan geografis dan iklim terhadap manusia dan masyarakat. Menurutnya, iklim dan geografi tidak hanya membentuk ciri fisik tapi juga watak dan temperamen. Ia mengamati bahwa orang di daerah panas cenderung lebih ceria dan sederhana, sementara mereka yang di daerah dingin lebih serius dan rajin karena tantangan hidup yang lebih berat. Lingkungan juga berdampak pada cara hidup dan ekonomi. Misalnya, gurun yang kering mendorong gaya hidup nomaden dengan solidaritas kelompok yang kuat, sedangkan lingkungan subur memungkinkan perkembangan pertanian, kota besar, perdagangan, dan masyarakat yang lebih kompleks. Meski sangat menekankan peran lingkungan, Ibnu Khaldun tidak menganggapnya sebagai satu-satunya penentu. Ia juga mengakui akal dan

¹⁸ Sutrisno Kutoyo, *Prof. H. Muhammad Yamin SH.: Cita-Cita Dan Perjuangan Seorang Bapak Bangsa* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2004).

¹⁹ George Katsiaficas, "Ibn Khaldun: A Dialectical Philosopher for the 21st Century*," *New Political Science* 21, no. 1 (1999): 45–57, <https://doi.org/10.1080/07393149908429851>.

²⁰ Josephine Van Den Bent, "'None of the Kings on Earth Is Their Equal in 'Aṣabiyya': The Mongols in Ibn Khaldūn's Works," *Al-Masāq* 28, no. 2 (May 3, 2016): 171–86, <https://doi.org/10.1080/09503110.2016.1198535>.

kemampuan manusia untuk beradaptasi dan mengubah lingkungannya.

3. Ekonomi

Ibnu Khaldun tidak memisahkan ekonomi dari studi peradaban, melainkan melihatnya sebagai bagian tak terpisahkan. Ekonomi berbicara tentang pentingnya pembagian kerja dan spesialisasi sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Nilai suatu barang atau jasa berasal dari jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk membuatnya, sebuah pemikiran awal tentang teori nilai tenaga kerja. Ibnu Khaldun juga memahami bagaimana penawaran dan permintaan berinteraksi untuk menentukan harga di pasar. Peran negara dalam ekonomi secara mendalam, mulai dari pentingnya perlindungan dan keadilan untuk menciptakan lingkungan yang stabil, hingga dampak pajak pada pertumbuhan ekonomi. Pajak yang rendah dan adil akan mendorong produksi, sementara pajak yang tinggi justru akan menghambatnya. Pemikiran ini juga melihat bahwa pengeluaran pemerintah dapat merangsang ekonomi, namun kemewahan para penguasa justru bisa memicu krisis keuangan. Selain itu, Ibnu Khaldun membahas fungsi uang sebagai alat tukar, pengukur nilai, dan penyimpan nilai, dengan emas dan perak sebagai standar moneter ideal. Ia bahkan mengamati adanya siklus ekonomi yang sejalan dengan siklus peradaban, di mana masa kejayaan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi pesat, dan kemunduran oleh penurunan produksi dan kemiskinan ²¹.

4. Permusyawaratan

Walaupun Ibnu Khaldun lebih banyak membahas naik turunnya dinasti, gagasan tentang musyawarah (*syura*) secara tidak langsung hadir dalam pemikirannya terkait stabilitas dan legitimasi kekuasaan. Di awal berdirinya sebuah dinasti, terutama yang berbasis solidaritas agama, keputusan seringkali diambil melalui musyawarah. Ini penting untuk menjaga persatuan dan dukungan rakyat. Ia juga mengakui pentingnya mendengarkan nasihat dari para ulama dan orang bijak untuk menjaga stabilitas. Namun, saat dinasti berkembang menjadi monarki absolut dan ikatan solidaritas melemah, peran musyawarah pun berkurang, yang pada akhirnya turut menyebabkan kemunduran. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekuasaan yang langgeng harus didasari oleh keadilan. Keadilan ini, secara tidak langsung, menuntut adanya semacam pertimbangan kolektif atau 'musyawarah' dalam arti luas, agar pemimpin bisa memahami masyarakat dengan baik. Kekuasaan yang tiranik dan tidak adil pada akhirnya akan kehilangan dukungan rakyat dan solidartiasnya, mempercepat kehancurannya. Singkatnya, meskipun Ibnu Khaldun tidak merumuskan teori demokrasi modern, pemahamannya tentang solidaritas sebagai fondasi kekuasaan dan pentingnya keadilan serta konsensus di awal pembentukan dinasti menunjukkan bahwa ia menghargai pentingnya pertimbangan bersama dan legitimasi dalam pemerintahan ²².

²¹ Adil H. Mouhammed, "On Ibn Khaldun's Contribution to Heterodox Political Economy," *History of Economics Review* 46, no. 1 (January 2007): 89–105, <https://doi.org/10.1080/18386318.2007.11682111>.

²² A. J. Fromherz, "Applying Ibn Khaldun: The Recovery of a Lost Tradition in Sociology / Makers of Islamic Civilization: Ibn Khaldun," *The Journal of North African Studies* 20, no. 5 (October 20, 2015): 891–92, <https://doi.org/10.1080/13629387.2015.1070463>.

D. Rumusan Muh. Yamin Tentang Filsafat Sejarah Nasional

Pola penulisan sejarah di Indonesia dapat diklasifikasi sesuai dengan periode dalam Sejarah Indonesia. Pada masa kuno/klasik, penulisan sejarah berpusat pada kekuasaan dan cerita raja-raja. Sejarah ditulis oleh para pujangga kerajaan untuk kepentingan legitimasi raja dan kekuatan politiknya, model penulisan semacam ini biasa dikenal dengan istilah *Historiografi Tradisional*. Sudah tentu penulisan historiografi ini sarat dengan subjektivitas karena penulisan sejarah ditujukan untuk menguatkan posisi orang-orang penting di dalam sebuah pemerintahan kerajaan. Memasuki periode setelahnya, ketika Nusantara dikuasai oleh sekelompok pedagang asing yang kemudian menjelma menjadi kolonialis, tentunya ada kepentingan besar untuk melanggengkan kekuasaan imperialisnya dengan menggunakan sejarah sebagai alat legitimasi. Penguasa kolonial memiliki akses penuh terhadap sumber-sumber sejarah di masa kuno sekaligus menjadi pelaku sejarah di masa pemerintahan kolonialnya. Penulisan sejarah di masa ini dikenal dengan istilah *Historiografi Kolonial*. Memasuki periode pergerakan nasional, ketika kelompok intelektual bersatu membangun kekuatan dalam skala lebih luas untuk mencapai cita-cita kemerdekaan sampai kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 menjadi titik balik penting dalam penulisan sejarah. Cerita-cerita tentang perjuangan melawan kolonialisme-imperialisme mulai ditulis, tokoh-tokoh besar nasional mulai tercatat secara resmi dalam buku-buku sejarah, dan pada masa ini penulisan sejarah sudah mulai mengedepankan aspek metodis yang kemudian dikenal dengan istilah *Historiografi Nasional*²³

Berbagai kejadian dari sejarah Indonesia dalam hubungan yang umum kemudian membentuk filsafat sejarah nasional yang diterjemahkan oleh Yamin menjadi empat pilar/sila, di antaranya²⁴:

1. *Sila Pertama: Kebenaran*

Kebenaran dalam konteks ilmu filsafat adalah sebuah proses pencarian. Secara tegas, di dalam ilmu filsafat tidak mengharuskan manusia untuk menggenggam kebenaran mutlak, melainkan berjalan dan mencari untuk menuju sebuah kebenaran. Karena pada hakikatnya

²³ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia* (Penerbit Ombak, 2014); Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bentang Pustaka, 2005).

²⁴ William H Frederick and Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi* (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, (LP3ES), 2017).

manusia hanya bertugas untuk mencari kebenaran, dan posisi kebenaran itu sendiri ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah kemudian filsafat sejarah memiliki dinamika yang aktif, tidak ada satu poros yang dapat menghentikan dinamika itu sehingga kebenaran mutlak tidak akan didapatkan. Oleh karena sang pencari kebenaran diibaratkan sebagai seorang musafir yang merantau untuk mendekati kebenaran itu, sedangkan dinamika yang aktif akan selalu berjarak dengan sang pencari kebenaran. Maka seorang pemikir dalam menjalankan usahanya untuk mencari kebenaran dibekali oleh *alah-hikmah* yang bernama pikiran. Kebenaran bertempat dalam alam batin berbagai kejadian di masa lampau yang berisi tentang aktifitas manusia. Meskipun kebenaran tidak dapat dimiliki oleh sang pencari kebenaran, akan tetapi dengan menafsirkan berbagai kejadian masa lampau yang didasarkan oleh keyakinan subyektif berdasarkan perangkat berpikir yang ada, akan menghasilkan keterangan yang obyektif.

Relevansi dengan pemikiran Ibnu Khaldun: Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kritik sumber untuk menghindari kesalahan historiografi seperti yang umum terjadi di masanya. Misalnya tendensi untuk keberpihakan pada pihak tertentu, imitasi narasi tanpa verifikasi sumber yang jelas serta tidak memperhatikan konteks sosial politik sebuah peristiwa. Sejarah sebagai ilmu harus dapat mengungkapkan kebenaran objektif tentang *umran* (peradaban) dan berbagai pola yang menjadi dasar perkembangan peradaban itu sendiri ²⁵.

2. Sila Kedua: Sejarah Indonesia

Dalam hal ini, objek utama yang menjadi agenda studi adalah sejarah Indonesia. Maka sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang dirumuskan secara alamiah untuk mengistilahkan hasil kajian dari objek yang dimaksud. Oleh karena itu kemudian sejarah yang dikaji secara mendalam menjadi sebuah filsafat-sejarah, maka berbagai kejadian sebagai bagian dari proses peradaban manusia di masa lampu membatasi filsafat itu menjadi lebih khusus, sedangkan cara menafsirkan dan mencari hubungan antar kejadian itu berada dalam taraf yang umum dan universal.

Relevansi dengan pemikiran Ibnu Khaldun: Metodologi sejarah fokus untuk membahas berbagai kejadian dalam unit sejarah dalam konteks perkembangan masyarakat sebagai penggerak peradaban. Berbagai faktor yang memengaruhi gerak manusia sebagai agen sejarah di antaranya dipengaruhi oleh berbagai faktor: geografi, ekonomi, politik. Hal ini

²⁵ Amri, "The Concept of 'umran.'"

kemudian memberikan kerangka berpikir bagi Yamin dalam menekankan ciri khas sejarah Indonesia sebagai entitas yang mandiri.

3. Sila Ketiga: Sintesis

Tafsiran dari peristiwa di masa lampau yang didasarkan atas bukti-bukti yang ditinggalkan dan dicari hubungan-hubungan kejadiannya akan menghasilkan sejarah Indonesia yang bersifat umum dan menghindari sifat keberpihakan. Ilmu sejarah mendapatkan corak yang beragam sebagai hasil dari tafsiran-tafsiran yang telah dilakukan. Pengambilan perspektif di dalam melakukan interpretasi menjadi faktor penting dalam menentukan klasifikasi tema sejarah. Seperti misalnya, sejarah ekonomi dihasilkan dari tafsiran yang didasarkan pada ilmu ekonomi, begitu pula dengan sejarah kesenian, sejarah hukum, sejarah pendidikan, sejarah nasional dan diplomasi. Semuanya merupakan irisan dari narasi besar masa lampau berdasarkan gejala dan kejadian yang dihasilkan dari aspek manakah yang diamati. Akan menjadi lebih holistik apabila irisan-irisan tafsiran tersebut disatukan dalam sebuah narasi sejarah. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara keseluruhan berbagai aspek yang dilakukan oleh masyarakat di masa lampau. Tugas dari ilmu sejarah adalah menyusun berbagai tafsiran tersebut dalam satu kumpulan tafsiran, dan itulah yang dinamakan sebagai tafsiran sintesis. Tafsiran sintesis inilah yang kemudian memberikan jaminan atas penulisan sejarah yang lebih sempurna. Pijakan lain yang dapat digunakan di dalam menyusun narasi sejarah Indonesia adalah filsafat Pancasila sebagai bekal elaborasi dalam membangun narasi soal Republik Indonesia, dan filsafat sejarah yang akan menjadi perangkat dalam menyusun kerangka dan isi sejarah Indonesia itu sendiri. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun narasi yang dimaksud sudah tersedia, hanya saja *filosofi sintesis* untuk menyusun itu masih belum dirumuskan secara konkrit.

Relevansi dengan pemikiran Ibnu Khaldun: Ibnu Khaldun melihat bahwa sejarah merupakan suatu ilmu yang mempelajari pola-pola kejadian peradaban dan faktor-faktor yang memengaruhi siklus hidup komunal. Pendekatan interdisipliner diperlukan sebagai alat bantu merangkai *puzzle* masalah secara empiris dengan menggunakan analisis sosiologis-ekonomis sebagai bentuk awal tafsiran yang sintesis.

4. Sila Keempat: Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme turut memberikan corak yang khas terhadap filsafat sejarah. *Pertama* objek utama studi ini adalah sejarah Indonesia. Sehingga harus diberikan perbedaan yang signifikan antara narasi sejarah Indonesia sebelum proklamasi, karena yang menjadi dasar penulisan sejarah Indonesia pasca 1945 adalah Kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai negara merdeka yang telah lepas dari cengkraman sistem kolonial. Diharapkan kemerdekaan itu juga menjadi landasan kebebasan berpikir dalam menafsirkan sejarah Indonesia dan menjadi syarat mutlak bagi segala ilmu pengetahuan. *Kedua* cara menafsirkan berbagai kejadian sejarah disesuaikan dengan jalan pikiran orang-orang Indonesia yang telah bebas merdeka, yang tidak lagi terikat oleh tendensi dan prasangka sempit dalam ruang pikiran yang terbatas. *Ketiga* uraian dengan lisan yang melukiskan sejarah Indonesia harus memenuhi syarat *isnad* supaya secara subyektif sesuai dengan susila perjuangan kemerdekaan. Artinya bahwa karangan penulisan sejarah Indonesia didasarkan pada 'hasrat normatif' bangsa Indonesia yang telah berhasil memerdekakan dirinya sendiri sehingga para pembaca dapat tergugah rasa nasionalisme Indonesia-Merdeka-nya untuk dapat memberikan sumbangsih moral terhadap ilmu pengetahuan. Maka diharapkan filsafat ini dapat mengisi ruang jasmani dan rohani atas sintesis-sintesis yang disusun dalam narasi sejarah Indonesia.

Relevansi dengan pemikiran Ibnu Khaldun: Konsep '*assabiyah*—solidaritas kelompok dalam pikiran Ibnu Khaldun merupakan sebuah konsep yang memiliki kesamaan substansi dengan nasionalisme modern. Solidaritas kelompok merupakan sebuah fondasi kolektivitas yang mendorong terbentuknya sebuah peradaban. Dalam pikiran Yamin, nasionalisme dapat menjadi '*assabiyah* yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Muara dari solidaritas kolektivitas ini nanti akan dijawantahkan salahsatunya dalam bentuk kekuasaan politik.

Menutup uraian Yamin di atas, Ali²⁶ memberikan penegasan atas filsafat sejarah nasional.

"Sudah diketahui bahwa sejarah nasional adalah sejenis cerita sejarah yang istimewa. Maka keistimewaan dari suatu sejarah nasional ialah bersifat subjektif di bawah sadar. Sifat di bawah sadari disebabkan oleh garak jiwa nasional yaitu bahwa sifat subjektif itu merupakan wujud dari jiwa nasional. Jelaslah bahwa suatu Sejarah Nasional mempunyai sifat-mutlak yakni subjektif. Apabila sejarah nasional tidak bersifat subjektif di bawah sadar, maka sifat subjektif-sadar berarti bahwa pengarang cerita sejarah dengan sengaja membuat cerita sejarah yang bersifat subjektif. Dapatlah disimpulkan bahwa dengan sengaja cerita itu dibuat secara tidak jujur dan

²⁶ M Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

serba berat sebelah, yaitu bahwa cerita sejarah itu benar-benar bersifat perkosaan atau pemalsuan dari cerita sejarah yang sebenarnya”

Keterangan di atas menunjukkan bahwa unsur subjektif dalam menyusun narasi sejarah Indonesia tidak didasarkan atas kesengajaan, melainkan unsur subjektif itu muncul dari kesadaran jiwa nasional, yaitu semangat mencintai bangsa dan tanah air. Ali juga berpendapat, bahwa sejarah nasional harus disusun berdasarkan keyakinan nasional yang irasional untuk menggapai pandangan hidup nasional atau filsafat nasional.

Apabila dalilnya demikian, persoalannya kemudian adalah, bagaimana cara merumuskan itu? Secara singkat dapat dimaknai seolah-olah tidak ada urusan yang logis untuk memberikan sebuah penguatan ideologis. Apakah penulisan sejarah nasional harus sepenuhnya didasarkan pada semangat ideologis? Sebenarnya, hal ini akan menimbulkan masalah baru ketika suatu tuntutan ideologis harus dijadikan sebuah studi akademik. Mengubah aspek etik menjadi pendekatan metodik bukanlah tugas yang mudah. Ada elemen-elemen ilmiah yang perlu dipenuhi agar narasi sejarah dapat mendekati objektivitas. Sedangkan, kadangkala tuntutan ideologis berbicara dalam tataran imajinasi dan keberpihakan yang cukup serius, sehingga perlu untuk ditinjau kembali nilai-nilai ideologis-nasional yang memang benar-benar mencerminkan fakta dari unit-unit sejarah Indonesia²⁷.

Terlepas dari persoalan subjektifitas-ideologis tersebut, Yamin telah berupaya mencurahkan pikirannya dalam membangun narasi historiografi Indonesiasentris yang utuh. Meskipun demikian kita juga tidak dapat memungkir, bahwa di dalam narasi sejarah tidak ada yang sepenuhnya “objektif”. Sejarah tidak dapat melukiskan masa lalu seperti apa adanya. Ia adalah buah hasil tafsiran manusia yang berjarak dari masa lalu itu sendiri. Sedangkan tafsiran adalah sesuatu yang bersifat subjektif, karena telah dibumbui oleh pemahaman, pendekatan, dan imajinasi sang penafsir. Subjektifitas tetap menjadi pernak-pernik di dalam narasi sejarah Indonesia yang selalu diupayakan untuk tetap berpegang pada asas objektif dengan berdasar pada bukti-bukti dan sumber yang ada.

E. Kesimpulan

Corak historiografi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia setidaknya dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis sesuai dengan babakan umum dalam Sejarah Indonesia di antaranya: (1) Historiografi Tradisional; (2) Historiografi Kolonial; (3) Historiografi Modern. Untuk

²⁷ Moch Dimas Galuh Mahardika et al., “Historiografi Indonesiasentris: Problematika Dan Tantangan,” *Historiography: Journal of Indonesian History and Education* 1, no. 4 (2021): 459–69.

menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana proses sejarah bangsa Indonesia tentunya harus menggunakan pendekatan, cara pandang, dan metode ilmiah yang memadai supaya penulisan sejarah Indonesia mencapai titik objektivitasnya.

Historiografi Indonesia yang mulai dirumuskan secara metodik untuk mendapatkan objektivitas dari berbagai kejadian sejarah Indonesia dibahas secara komprehensif dalam Seminar Sedjarah I pada tahun 1957. Tokoh-tokoh intelektual dan politik turut menyumbangkan gagasannya untuk merumuskan tujuan “bagaimana menulis sejarah Indonesia”. Salah satu tokoh nasional yang terlibat dalam seminar tersebut dan eksistensinya menjadi sorotan adalah Muhammad Yamin. Yamin merumuskan beberapa poin tentang filsafat sejarah nasional yang diharapkan mampu menjadi pondasi kuat untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana menulis sejarah Indonesia. Rumusan Yamin tentang filsafat sejarah nasional setidaknya relevan dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang cara berpikir sejarah dan cara kerja filsafat sejarah. Uraian Yamin tentang rumusan filsafat sejarah nasional yang dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Khaldun dapat diistilahkan sebagai “Catur Sila Chalduniah”, beberapa poin tersebut di antaranya: (a) Kebenaran; (b) Sejarah Indonesia; (c) Sintesis; (d) Nasionalisme Indonesia.

Sejatinya, Yamin memberikan fondasi intelektual tentang bagaimana sejarah Indonesia ditulis dengan sudut dan cara pandang yang hari ini disebut sebagai “Indonesia-sentris”, tentu saja ada tujuan ideologis—tanpa mengesampingkan kerja-kerja akademik dalam penyusunannya. Tulisan ini adalah sekelumit pembahasan tentang di balik layar historiografi Indonesia-sentris dalam narasi sejarah Indonesia yang tentunya masih terlalu kompleks untuk dijelaskan hanya dalam satu tulisan. Perlu ada dialektika dan pertukaran ide kepada penulis-penulis lain yang akan melakukan riset dengan tema serupa. Kekurangan dalam artikel ini adalah minimnya penggunaan sumber primer, baik dokumen resmi, maupun dokumen ego yang mempublikasi pikiran tokoh-tokoh sebagai pembahasan utama tulisan ini. Semoga penulis berikutnya dapat menimpali sebuah diskursus sebagai upaya penyempurnaan berbagai keterbatasan perspektif dan kelemahan dalam penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

Abdullahi, Ali Arazeem, and Bashir Salawu. "Ibn Khaldun: A Forgotten Sociologist?" *South African Review of Sociology* 43, no. 3 (2012): 25–40.

Abou-Tabickh, Lilian. "How Significant Is the Term 'Condition' (Ḥāl) to Understanding Ibn Khaldūn's Historical and Political Thought? Al-ʿaṣabiyya as an 'Essential Condition' of Human Association." *The Journal of North African Studies* 27, no. 4 (2022): 761–85. <https://doi.org/10.1080/13629387.2020.1861444>.

Ali, M. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

Amri, Laroussi. "The Concept of 'umran': The Heuristic Knot in Ibn Khaldun." *The Journal of North African Studies* 13, no. 3 (September 2008): 351–61. <https://doi.org/10.1080/13629380701844672>.

Asshidiqie, J, and A Marwan. "Proklamasi Menurut Mohammad Yamin: Berdaulat Dan Berkonstitusi." *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2019): 1–20.

Chabane, Djamel. "The Structure of 'Umran al-'Alam of Ibn Khaldun." *The Journal of North African Studies* 13, no. 3 (2008): 331–49.

Frederick, William H, and Soeri Soeroto. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, (LP3ES), 2017.

Fromherz, A. J. "Applying Ibn Khaldun: The Recovery of a Lost Tradition in Sociology / Makers of Islamic Civilization: Ibn Khaldun." *The Journal of North African Studies* 20, no. 5 (October 20, 2015): 891–92. <https://doi.org/10.1080/13629387.2015.1070463>.

Hobsbawm, E. J. "From Social History to the History of Society." *Daedalus* 100, no. 1, (1971): 20–45.

Kartodirdjo, Sartono. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Penerbit Ombak, 2014.

— — —. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Katsiaficas, George. "Ibn Khaldun: A Dialectical Philosopher for

the 21st Century*." *New Political Science* 21, no. 1 (1999): 45–57. <https://doi.org/10.1080/07393149908429851>.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka, 2005.

Kusuma, A.B, and R.E Elson. "A Note on the Sources for the 1945 Constitutional Debates in Indonesia." *Bijdragen Tot de Taal-, Land En Volkenkunde* 167, no. 2–3 (2011): 196–209.

Kutoyo, Sutrisno. *Prof. H. Muhammad Yamin S.H.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.

— — —. *Prof. H. Muhammad Yamin SH.: Cita-Cita Dan Perjuangan Seorang Bapak Bangsa*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2004.

Mahardika, Moch Dimas Galuh, Danan Tricahyono, Erisya Pebrianti Pratiwi, and Fahmi Nur Ramadhan. "Historiografi Indonesiasentris: Problematika Dan Tantangan." *Historiography: Journal of Indonesian History and Education* 1, no. 4 (2021): 459–69.

Moeflih, Hasbullah, and Dedi Supriyadi. *Filsafat Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Mouhammed, Adil H. "On Ibn Khaldun's Contribution to Heterodox Political Economy." *History of Economics Review* 46, no. 1 (January 2007): 89–105. <https://doi.org/10.1080/18386318.2007.11682111>.

Niam, Syamsun, Imam Fuadi, and Mohammad Ridho. "PANCASILA VIS A VIS ISLAM The Views of the Four Indonesian Muslim Leaders and Their Implication in Stemming the De-Ideologization of Pancasila in Indonesia)." *Islamic Inquiries* 2, no. 1 (June 2023): 25–40. <https://doi.org/10.22034/is.2023.330782.1073>.

Purwanto, Bambang. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*. Yogyakarta: Ombak, 2008.

Smirnov, Andrey V. "Translation as the Manufacturing of Meaning: A Few Words about the Title of Ibn Khaldūn's History." *Russian Studies in Philosophy* 58, no. 6 (November 1, 2020): 491–521. <https://doi.org/10.1080/10611967.2020.1868262>.

Sujati, Budi. "Konsepsi Pemikiran Filsafat Sejarah Dan Sejarah Menurut Ibnu Khaldun." *Tamaddun* 6, no. 2 (2018): 127–47.

Sularto, St, and D. Rini Yunarti. *Konflik Di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI Dan Kemerdekaan*. Jakarta: Kompas, 2010.

Van Den Bent, Josephine. “None of the Kings on Earth Is Their Equal in 'Aṣabiyya': The Mongols in Ibn Khaldūn's Works.” *Al-Masāq* 28, no. 2 (May 3, 2016): 171–86. <https://doi.org/10.1080/09503110.2016.1198535>.

Yamin, Muhammad. *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1951.

Yamin, Muhammad. “Tjatur-Sila Chalduniah,” 26–34. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1957.